



Pemkab Sekadau Teken MoU Bersama BPK RI

Borneo Tribune, Sekadau

BUPATI Sekadau Simon Petrus mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK RI Perwakilan Kalbar dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dan Bank Kalbar tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar di Auditorium lantai dua gedung tower BPKRI, Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat.

Hadir dalam penandatanganan MoU itu, ketua BPK RI pusat, Gubernur Kalbar, Gubernur Maluku dan Maluku Utara, Bupati Kabupaten/kota Se-Kalbar, Maluku dan Maluku Utara, kepala BPKAD 3 Provinsi. Penandatanganan diawali oleh Bupati, ketua BPK RI dan dirut

Bank Kalbar.

Mendampingi Bupati Sekadau, Sekda Pemkab Sekadau, Drs. Yohanes Jhon, MM, BPKAP Kabag Humas dan Protokol setda Kabupaten Sekadau.

Sebagai informasi, Kabupaten Sekadau menerima kesepakatan dan menjalankan kesepakatan tersebut dengan perangkat SIPKD secara online. Data transaksi rekening Provinsi Kabupaten / Kota se-kalbar Maluku dan Maluku utara Secara online pada PT BPD Kalbar dan BPD Maluku termasuk bank-bank lainnya dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah.

Kepala BPK RI Hadi Purnomo, mengatakan penandatanganan kesepakatan atau

MoU antar BPK RI dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, sangat penting dilakukan guna menuju transparansi anggaran yang akuntabilitas.

Bupati Sekadau, Simon Petrus mengatakan pelaksanaan MoU tersebut cukup penting dilaksanakan, guna meminimal terjadi penyimpangan transaksi menggunakan keuangan Negara. Apalagi keamanan cukup baik dengan transaksi perangkat lunak system elektronik di SIPKD.

“Pemerintah Kabupaten sekadau siap membantu BPK dan siap mempertahankan WTP dan bisa bertanggungjawabkan penggunaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabilitas,” tandasnya. (Mto) □